

Sumber Daya Desa dalam Proses Industrialisasi: Kebijakan bagi yang Tertinggal

Nuriman Hasibuan

Latar Belakang

Jika kita menoleh sekitar satu-dua abad yang lalu, ketika kolonialis Belanda menekan petani dengan *culturstelsel* (CSS) dan kemudian meluncurkan *open-door policy* (ODP), petanda negeri ini masuk ke sistem liberal (Fernando), yang kemudian menghasilkan *agricultural incolution* (Geertz). Sebelum masa tanaman paksa, para petani lebih betah tinggal di desa, tetapi kemudian dengan datangnya kerja paksa, dan penggunaan lahan untuk tanaman ekspor; ternyata berdampak yang besar pada ekonomi desa. Kebun-kebun luas milik pemerintah menjadi *enclave* (kantong), yang terpisah dari kehidupan desa, oleh karena kelompok elite desa yang dapat menikmatinya secara berarti.

Hubungan *patron-client* yakni petani dan gusti (aristokrat) tetap berlangsung, sementara beban dari birokrat bertambah. Beban petani dan buruh petani makin berat, di samping menyediakan upeti kepada raja, pajak pada pemerintah kolonial, kerja keras untuk tanaman ekspor dan kerja rodi pada berbagai proyek-proyek infrastruktur. Dalam sistem feodal masing-masing kelompok masyarakat mempunyai fungsi yang 'har-

moni' bagi kerajaan, seperti militer sebagai benteng kerajaan, petani sebagai lumbung pangan, dan pedagang penyedia sandang. Hubungan yang demikian jadi berubah di bawah pemerintah kolonial, pihak kolonial melakukan eksploitasi sumberdaya alam dan manusia.

Pemerintah kolonial telah menggantikan posisi VOC pada akhir abad 18 dan berikutnya terjadi pula proses mencampuri dan mendesak posisi urusan aristokrasi dan birokrasi Jawa untuk kepentingan kolonial, seperti urusan perkebunan-perkebunan besar dan pabrik-pabrik. Komersialisasi hasil perkebunan untuk ekspor dan adanya upah telah mendorong monetasi kehidupan desa di satu sisi, tetapi pada sisi lain kemiskinan meningkat di desa.

Baik dengan kebijakan pertama (CSS) maupun yang kedua (ODP) yang jelas, Belanda bukan meningkatkan daya beli rakyat pribumi, tetapi sebaliknya mengeksploitasi sumberdaya manusia dan alam jajahannya untuk kemakmuran negerinya. Ada juga segelintir orang pribumi dan Cina yang ikut kaya, tetapi sebagai imbalan terhadap ketidakpeduliannya" pada nasib rakyat. Di sinilah bersumber kemewahan kaum aristokrat dan kelompok sekitarnya dan elit kolonial.

Selanjutnya, hasil kopi, gula dan indigo dari pulau Jawa menjadi komoditas primadona ke negeri Belanda khususnya dan ke Eropa umumnya. Dengan demikian Hindia Belanda, di satu pihak mulai masuk dan kapitalisme dunia, dan di pihak lain, lahan-lahan secara meluas dipaksa untuk ditanami tanaman yang cocok dengan pasar Eropa, sedangkan jumlah buruh tani makin meningkat. Pada tahun 1864, para buruh mendapat upah rata-rata per hari hanya sekitar 12,5 sen ditambah sekali makan siang. Waktu itu lahir pepatah: "Ada dina, ana upa" dan ana mangan, mangan apa". Sebagai ilustrasi tambahan, pada tahun 1988, seorang petani pengeluarannya per hari adalah sekitar 39 sen. Waktu itu seorang buruh-tani membutuhkan tiga cangkir beras yang berharga 1,5 sen per hari. Pada tahun 1891 seorang bupati menerima gaji sekitar 600 gulden per bulan.

Dengan sistem liberal itu, disparitas kemakmuran pribumi yang bekerja sebagai buruh tani dan petani dengan kelompok priyayi dapat digambarkan begini: "...*proverty made village life dreadful while a proper life was only enjoyed by priyayi*" (Suhartono, 1991. h. 183) Keadaan ini makin parah dengan terjadi krisis 1888.

Dengan berakhirnya CSS pada tahun 1870, dan berlakunya kebijakan ekonomi liberal, kemudian pada tahun 1900 lahir pula politik Etis dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pribumi. Pemerintah mengeluarkan pembiayaan sekitar 30 juta gulden untuk membangun irigasi, melakukan emigrasi, edukasi, membantu perkreditan untuk petani dan mendorong industri. Pada dekade pertama abad 20, harga beras di pasaran dunia meningkat, sehingga kesempatan bagi pemerintah kolonial untuk mengekspor beras, tetapi karena kebutuhan dalam negeri mulai lebih langka, maka ekspor beras dilarang. Kebijakan intervensi ini terjadi dalam masa "laissez-faire".

Ekonomi Pedesaan

Sekitar 95 persen pekerja mencari nafkah pada sektor pertanian, terutama usaha pangan dan perkebunan. Pada awal abad ke-19, kebijakan pemerintah berupaya untuk mendorong produksi padi, baik dalam bentuk bersawah maupun berladang. Pada awal tahun 1918, pemerintah mendirikan Central Distribution Service (CDS), yang berupaya memasok beras dari daerah surplus ke daerah minus. Malahan CDS mengambilalih semua aktivitas perdagangan beras. Ketika impor beras untuk daerah-daerah seberang juga macet, maka wilayah itu didorong untuk meningkatkan luas areal padi, sedangkan di Pulau Jawa luas kebun tebu berkurang sekitar 25% untuk dapat memperluas sawah (Prince, 1991, h. 167).

Setelah perang dunia pertama, dan terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1919. Perbaikan ekonomi pribumi kembali terbentur, sedangkan strategi *import-substitution* dalam industri, untuk tujuan memenuhi kebutuhan domestik, sehingga industri dalam negeri dilindungi dari saingannya, seperti barang-barang yang berasal dari Eropa, AS dan Jepang. Kebijakan industrialisasi ini tidak berhasil karena krisis ekonomi 1929.

Ekonomi Hindia Belanda terpukul berat. Hal ini dapat dipahami, oleh karena dampak dari ekonominyayang berorientasi ekspor bahan mentah, sehingga begitu rapuh pada siklus ekonomi. Sementara itu, masalah-masalah pertanian (perkebunan khususnya) telah menjadi prioritas. Kajian-kajian yang lebih serius di kalangan akademisi di negeri Belanda baru pada tahun 1910 yaitu dengan berdirinya Agricultural Extension (EAS), yang kemudian memperkerjakan alumni Agricultural College. Lebih lanjut College ini menjadi Universitas Pertanian. Universitas ini pada tahun 1930 membuka studi pedesaan. Sebenarnya,

penelitian-penelitian tentang pedesaan dan sistem pertanian pribumi mulai mendapat tempat setelah tahun 1925. Diskusi-diskusi yang berkembang waktu itu di Hindia Belanda adalah bagaimana untuk perbaikan bidang pertanian jangka panjang, yang dapat diterima oleh pribumi seperti yang disampaikan oleh Prince:

.. there was shift from information aimed at the individual farmer to collective extension. Initially, extension was based the concept of the farmer as a individual, a concept understandable to the Western mind. However, research focusing on the Indonesian situation made clear that the Indonesia farmer was so rooted in traditional community ties that information could best be aimed at the inside desa".

Selanjutnya, Boeke tahun 1930-an, menemukan konsep ekonomi dualistik Indonesia. Masyarakat tradisional yang lebih dimotivasi nilai-nilai sosial, sedangkan pada bagian lain masyarakat modern yang kapitalistik sensitif dengan motivasi ekonomi. Hal ini membawa akibat kebijakan ekonomi yang digunakan harus lepas dari andaian-andaian homogenitas wilayah dan masyarakat. Temuan Boeke ini mendorong pula lahirnya kajian-kajian pembangunan regional umumnya, ekonomi regional khususnya bagi Indonesia dewasa ini.

Dalam masa kemerdekaan telah banyak pula dilakukan kajian-kajian pedesaan oleh berbagai disiplin ilmu, baik oleh pakar domestik maupun manca negara. Hasil-hasil membanggakan dari IBP dan UGM, lebih cenderung mendukung kebutuhan praktisi, kurang mendalami sebagai kajian konsep dalam pengembangan ilmu. Apa lagi kecenderungan pembangunan dalam tiga dasa warsa terakhir, dapat dengan pendekatan *top-down* untuk seluruh wilayah. Sampai dengan tahun 1993, mata kuliah

Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) menjadi salah satu mata-pelajaran wajib pada Fakultas Ekonomi di Indonesia.

Pemberian mata-pelajaran ini tidak banyak memberi motivasi bagi lulusan Fakultas Ekonomi untuk lebih intensif memahami pembangunan pedesaan, oleh karena:

- (1) Materi yang kurang relevan tidak menekankan pada konsep dan aktualisasi;
- (2) Pendekatan pembangunan tidak bervariasi, pendekatan yang homogen, kurang cocok dengan kebutuhan; pada hal yang dibutuhkan adalah pendekatan yang bersifat interdisiplin;
- (3) Tenaga pengajar yang kurang mendalami aspek-aspek konsep dan kondisi pedesaan Indonesia; Literatur tentang kajian-kajian pedesaan secara keilmuan masih kurang di Indonesia;

Di samping masalah kurikuler-internal, terdapat pula masalah eksternal, yakni:

- (1) pandangan yang "sempit" terhadap dunia pedesaan;
- (2) pandangan pertama, ini berakibat pada insentif yang tidak menarik untuk kegiatan pembangunan pedesaan;
- (3) orientasi pembangunan Indonesia, sampai dewasa ini masih berat pada pertumbuhan ekonomi.

Memang, pada Trilogi Pembangunan dengan butir-butir pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, tetapi dalam aktualisasi kegiatan yang mendukung pemerataan dan pertumbuhan masih belum berimbang. Sampai dewasa ini, kesenjangan ekonomi secara regional, terutama desa-kota, masih makin melebar (*Hasibuan, 1992*). Hal ini telah diakui oleh Bappenas. Namun, bahwa tidak ada anggota masyarakat yang makin miskin merupakan tantangan untuk dikaji lebih cermat. Bukti-bukti mikro masih dapat membentah tesis

terakhir ini. Pada berbagai desa tertinggal yang telah dimasuki IDT, ditemukan pula adanya kelompok-kelompok miskin dalam proses *involusi*, yang belum terjangkau dengan program IDT. Kelompok-kelompok ini masih *tersembunyi di lapisan terbawah, sehingga belum terlihat oleh "aparatus desa"*, seperti kelompok janda miskin yang menanggung anak yatim 3-5 orang, buruh tani miskin yang kurang gizi, malahan juga kelompok yang disebut *hunger-rents* menurut Chayanov, kelompok yang menjadi korban pasaran rentenir dan kelompok-kelompok yang masih terisolasi baik secara geografis maupun sosiologis.

Proses involusi itu jelas terlihat pada pemilikan lahan yang makin menyempit di satu pihak, sedangkan pada pihak lain beban hidup makin berat, sewa-lahan yang meningkat, harga produk yang dihasilkan yang tidak stabil, dan pengaruh muslim yang makin kurang dapat diramalkan. Selanjutnya, masih ada kelompok-kelompok masyarakat belum mampu keluar dari eksploitasi sistem patron-klien, kelompok-kelompok yang dirundung penyakit, sehingga harta produktif dijual.

Selanjutnya, pada beberapa lokasi di luar Jawa, kelompok-kelompok sasaran IDT atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari kelompok menengah desa atau sebagian merupakan lingkaran nepotisme elit desa, dengan alasan orang-orang miskin belum bisa dipercaya. Di samping pihak aparat pemerintah, bahwa belum memahami pengelolaan dana IDT, yang seharusnya dikelola secara terdesentralisasi oleh POKMAS. Ternyata pada berbagai tempat terjadi hambatan sebagian terletak pada aparat, yang maksudnya semula untuk meringankan resiko dan dana tidak produktif, tetapi sebelumnya menunjukkan ketidaktahuan sebagian aparat pada upaya pengalangan dana IDT.

Selanjutnya kegiatan sektoral yang harus menjadi penunjang sering tidak jalan untuk kelompok dijamin modal kerja, tetapi dengan hibah modal ini belum cukup, karena faktor sumberdaya manusianya masih perlu diberdayakan. Masalah ini makin nyata terlihat, jika POKMAS mempunyai kegiatan yang tidak terkait dengan mata pencaharian sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang masih relatif baru membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan ini tidak mungkin difahami ataupun dikuasai hanya dengan pelatihan atau penyuluhan satu-dua hari.

Dari uraian bagian pertama dan kedua, khususnya untuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal, permasalahan pembangunan pedesaan masih belum banyak berubah secara berarti bila dikaji dari aspek struktural. Masalah ini menjadi bahasan kita selanjutnya.

Pemberdayaan Kelompok

Dewasa ini orientasi pembangunan Indonesia masih pada pertumbuhan yang memadai. Ini berarti mengolah sumber-sumber yang lebih cepat dan lebih tinggi produktivitasnya. Walaupun pada PJP II tujuan pembangunan adalah bidang ekonomi, yang seiring dengan peningkatan sumberdaya manusia, tetapi secara implisit prioritas adalah pada pertumbuhan ekonomi. Surplus yang diperoleh lebih dulu, kemudian bagian yang surplus itu akan dijadikan sebagai modal pemerataan. Oleh karena itu, masih sulit untuk menurunkan kesenjangan ekonomi secara berarti, baik pada Pelita VI yang sedang berlangsung dewasa ini ataupun pada Pelitia VII yang akan datang. Berbagai alasan dapat diajukan yang antara lain:

- (1). Kesenjangan yang dialami dewasa ini telah menjadi tingkat kesenjangan yang bersifat kumulatif, yakni merupa-

- kan bagian hasil pembangunan dalam masa hampir tiga dekade yang mengalami *bunga majemuk*, sedangkan sebarannya dampaknya makin meluas.
- (2). Melihat penurunan jumlah penduduk miskin selama 20 tahun terakhir ini terlihat makin sulit. Hal ini akibat kemiskinan yang akumulatif itu. Kelompok-kelompok itu makin sulit dijangkau oleh program-program penanggulangan penduduk miskin, kecuali pendekatan dan metodologi diubah misalnya dengan mobilisasi pembangunan yang partisipatif yang lebih terarah dan berkualitas.
 - (3). Ukuran tentang kesenjangan dalam berbagai dimensi sampai dewasa ini belum jelas, tetapi secara ekonomis tampaknya masih terus perlu diperbaiki. Ukuran kesenjangan ekonomi yang digunakan pemerintah dewasa ini, secara politis dan psikologis cukup memadai, tetapi kalau ukuran itu diperbaiki, yakni misalnya diganti dengan ukuran tingkat pendapatan (income), akan membuat kita lebih waspada.
 - (4). Kondisi ekonomi yang makin liberalistik, yang makin bersifat eksploitatif pada wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok yang masih lemah:
 - (5). Bahwa aktor pembangunan yang makin dominan adalah swasta, sedangkan peranan pemerintah sebagai regulator kadang agak meragukan dunia usaha;
 - (6). Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pemerataan masih begitu lunak, termasuk masih tawar-menawar dengan pihak swasta.;
 - (7). Kondisi ekonomi dan disiplin mayoritas aparaturnya relatif lemah, sehingga perilaku aparaturnya yang bersih, efisien dan berwibawa masih merupakan tantangan besar.
 - (8). Utang-utang harus terus dicicil secara tepat waktu, sesuai dengan jadwalnya, sehingga harus mengusahakan bidang, sektor dan proyek yang menciptakan nilai tambah yang tinggi lebih efisien. Sebaliknya, untuk memperbesar utang tampaknya makin sulit.
 - (9). Kemandirian ekonomi antara lain tercermin pada proporsi utang yang makin kecil bila dibandingkan dengan Pendapatan Nasional, sedangkan kualitas manusianya makin tinggi.
 - (10). Sesuai dengan proses industrialisasi dalam masyarakat kapitalis, porsi kerja upahan akan terus meningkat, tetapi di Indonesia, agaknya terjadi paradoks. Pertambahan relatif pekerja pada sektor upahan lambat, sedangkan pada sektor informal upah belum terjangkau dengan berbagai aturan formal. Hal ini pada satu pihak dapat sebagai *katup-penyelamat* dalam kesempatan kerja, tetapi pada pihak lain dapat pula memperkuat posisi kesenjangan ekonomi dan sosial.
 - (11). Gerakan pengentasan penduduk miskin masih jelas terlihat masih didominasi pemerintah, belum menjadi gerakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih mengalami banyak rintangan, seperti kecurigaan dan perizinan yang lambat.

Ini bukan berarti mengabaikan segala macam kebaikan pemerintah yang demikian banyak diarahkan ke pedesaan selama hampir tiga dekade, namun dari yang banyak itu kita pun dapat berkaca. Misalnya proyek dari berbagai Inpres, proyek-proyek dari berbagai departemen, perkreditan bank dan non-bank, serta bantuan pihak swasta. Tetapi dari segi biaya, jumlah itu masih kecil bila dibandingkan jumlah kredit untuk sektor-sektor perdagangan, industri dan angkutan. Walaupun

difahami bahwa ketiga sektor ini masih ada berkaitan dengan keperluan pedesaan. Biaya yang dikeluarkan untuk IDT diperkirakan masih lebih kecil daripada bagian untuk Tuan Tanzil.

Selanjutnya karena insentif pada sektor-sektor gurem kalah daripada insentif pada sektor-sektor yang maju, sedangkan daya eksploitasi sektor yang telah maju ini sebagian makin besar terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah pedesaan, bukan mendukung secara berarti kualitas kedua sumberdaya itu. Tampak dengan jelas, di sana-sini, pengolahan sumberdaya alam di samping membawa dampak lingkungan umumnya, lingkungan desa khususnya, kurang memperkuat pemberdayaan masyarakat desa yang miskin.

Oleh karena itu, masih merupakan pandangan minor, kalau persoalannya di balik menjadi: "Sudah datang saatnya, bahwa pemerataan dalam jangka panjang akan merupakan sumber pertumbuhan yang berarti bagi bangsa ini". Saya sejak lama, justru berpihak pada kebijakan ini untuk mengangkat dunia pedesaan, juga kelompok-kelompok tertinggal lainnya, sehingga tidak berdampak negatif secara luas. Jika insentif ditingkatkan ke sana, ibarat hukum bejana berhubungan, maka arus pembangunan makin berkualitas ke wilayah-wilayah yang masih terbelakang, terutama di luar Jawa. Pemerintah harus makin berperan dalam meningkatkan sumberdaya yang cocok di wilayah itu.

Sebagian besar desa di Indonesia begitu erat kaitannya dengan lingkungan. Ini terlihat dengan sistem kebutuhan energi yang hampir seluruhnya diperoleh dari lingkungan, sehingga jenis teknologi *ecotype* sangat dominan (Wolf, 1985), tetapi kita lamban mengembangkan jenis teknologi yang sangat mereka butuhkan, terutama yang bersifat *paleoteknik*, sehingga akan

mempersiapkan mereka ke tahap neoteknik. Desa-desa, terutama di luar Jawa, belum optimal memanfaatkan sumberdaya lingkungannya.

Desa yang mempunyai sumberdaya alam dan sumberdaya manusia utama di negeri ini, kurang diusahakan untuk peningkatan daya beli bagi penduduknya secara berarti. Dengan orientasi pertumbuhan, maka kebijakan yang lebih dominan ditujukan untuk pengembangan usaha-usaha besar yang dilindungi, tetapi mereka yang di daerah belakang kurang berdaya, lalu mereka terkena eksploitasi untuk ekspor dan memasok kebutuhan pangan penduduk kota. Tetapi, ketika produk-produk industri datang ke warung-warung desa, mereka dihadapkan dengan distorsi harga perlindungan bagi yang besar.

Sebuah paradoks lagi yang mengundang penelitian lebih mendalam. Tampaknya, mulai tampak kebenarannya, kelompok miskin membeli barang dan jasa itu dengan harga yang relatif mahal dari pada tingkat harga yang dibayar oleh orang-orang yang relatif mampu.

Dengan demikian, makin jelas posisi pembangunan pedesaan dewasa ini. Kebijakan-kebijakannya masih bersifat lunak, yang beberapa hal dapat merugikan penduduk desa dalam jangka panjang, seperti yang dialami para petani di Jawa dalam abad 19, yang berarti pula dampaknya makin luas pada wilayah perkotaan. Hal ini sehari-hari dapat disaksikan, yakni tentang persoalan lahan-lahan produktif rakyat baik di daerah suburban maupun di arah pedalaman. Rakyat tergiur menjual lahan produktif dengan harga murah, dan akhirnya sebagian dari mereka menjadi pekerja dengan tingkat upah yang rendah dan akhirnya mempercepat gerakan urbanisasi dan masuk ke dalam dunia kemiskinan baru dalam proses involusi.

Oleh karena itu pula, jika ada gerakan pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan, nuansanya menjadi relatif sensitif. Kegiatan itu, walaupun belum dilihat hasilnya, sering disebut *penunggangan* bukan pemberdayaan. Ada kekhawatiran banyak oknum aparat, bahwa kegiatan ini akan membuka "nanah" lama, kegagalan yang ditutupi, laporan-laporan yang perlu dikoreksi, kebocoran-kebocoran dan sebagainya. Bappenas berharap agar IDT ini dapat menjadi gerakan masyarakat, bukan gerakan pemerintah, sehingga dominasi pemerintah seyogyanya menurun sedangkan partisipasi masyarakat meningkat. Tetapi, itulah bagian yang dihadapi para pendamping POKMAS jauh di desa-desa terpencil, sehingga mereka *rikuh* membuat laporan yang benar dan dibutuhkan pada tingkat atas untuk pemantauan dan evaluasi.

Pada satu sisi, Bappenas telah berupaya untuk melakukan mobilisasi pendamping sebagai katalisator, tetapi kualitasnya kurang memadai untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Sebagian dari katalisator ini sangat bermutu, sehingga mereka ini perlu menyebarkan kemampuannya kepada para pendamping baru. Pada sisi lain, terlihat juga bahwa sebagian aparat di daerah kurang memahami "maunya" kelompok-kelompok POKMAS. Hal ini tidak perlu disesalkan oleh karena mereka masih dalam proses belajar. Hampir 25 tahun mereka melakukan pendekatan *Top-down*, yang dapat instruksi. Adalah kemajuan besar dari aparat tersebut jika dalam tiga tahun ini mereka masih mau ikut dalam proses belajar, sehingga mereka akan lebih memahami dan mengaktualisasikan pendapatan pembangunan yang partisipatif. (*participatory development*).

Kalaupun ada perilaku gerakan itu keliru, justru hal itu yang perlu segera diperbaiki, tetapi tidak melemparkan masalah lain yang memojokkan para pekerja dalam

proses pemberdayaan baik sosial maupun ekonomi. Proses kerja pemberdayaan dari bawah, jauh bedanya dengan proses pembangunan dengan gaya yang padat instruksi. Hal ini akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan yang lebih empati bersyarat adanya kebersamaan. Walaupun ide-ide baru itu cukup menyakitkan bagi yang menerima, namun proses membentuk kebersamaan akan membuka pintu hati dan pikiran untuk bertukar faham. Dalam keadaan demikian memang sulit tidak ada yang lebih pintar, atau tidak menggurui, tetapi bagi seseorang peneliti atau pembina sikap ingin banyak mendengar dan mencatat adalah sangat dibutuhkan. Seorang pembina atau pun pendamping harus menyadari kapan dia sebagai motivator, kapan sebagai katalisator dan kapan bertindak sebagai fasilitator; sehingga semua kekosongan dalam interaksi antara dia dan kelompok/individu dapat diisi dengan baik.

Pendekatan yang digunakan adalah benar-benar dengan *learning from below*, belajar dari bawah, bukan mengejar ke bawah. Dengan wadah kebersamaan tadi hal ini akan berjalan lancar, sehingga pembina dapat menguasai masalah-masalah dan kapasitas kelompok/individu. Hal ini lama kelamaan melalui aktualisasi kerja tanpa melalui konsep deduktif akan mengetahui keunggulan lokal pada kelompok/individu. Setelah aktualisasi kerja, akan dapat ditentukan siapa yang harus menjadi ketua, bendahara, penyuluh, komunikator dalam kegiatan-kegiatan kelompok.

Dalam penyelesaian masalah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah, karena hal ini mencoba membuat mekanisme pengambilan keputusan yang relatif terbuka. Kelompok bermusyawarah dalam

menyusun pembagian kerja, menyusun tata-tertib kerja, sanksi-sanksi yang perlu dan melakukan pencatatan hasil-hasil pertemuan yang sewaktu-waktu dapat dirujuk oleh kelompok atau anggota kelompok, perubahan-perubahan asset kelompok dan sebagainya.

Pendamping atau pembina membiasakan diri tidak selalu mengintervensi dalam musyawarah, kecuali kalau diminta oleh kelompok. Posisi pendamping pembina benar-benar tidak memihak kepada sub-sub kelompok. Dalam pemecahan masalah kadang-kadang perlu juga menggunakan pendekatan *makan bubur panas*. Tidak memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik, tetapi dimulai dengan latihan untuk memecahkan masalah-masalah yang relatif ringan, tetapi mendukung ke arah pemecah masalah yang lebih rumit.

Dalam uraian tadi makin jelas gambaran kegiatan yang bersifat partisipatif, yakni kelompok dengan anggota dapat berperan walaupun pembina tidak terlalu banyak mengintervensi. Hal ini lama-kelamaan akan membawa budaya musyawarah, keterbukaan, kemampuan mengemukakan pendapat, berorganisasi, menggerakkan organisasi dan dapat juga menuju kepada kinerja usaha bersama. Berapa lama proses ini berlangsung, tergantung pada kemampuan kelompok dan jenis kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu harus sampai pada implementasi secara aktual, sehingga mereka bisa mengukur sendiri kinerja mereka. Paling tidak, untuk desa-desa tertinggal, dengan usaha kopi atau lada dapat mencapai waktu 4 -5 tahun. Ini memakan waktu lama, karena:

Pertama, proses pengenalan kelompok baik sosial maupun ekonomi dan budaya sehingga dapat tergalih ide-ide dan mau-nya kelompok;

Kedua, ada masa identifikasi masyarakat, lingkungan dan kemampuan ekonomi kelompok, desa dan lain-lain;

Ketiga, pelatihan dan penyuluhan tentang budidaya, teknologi pasca panen dan tentang pasar, serta bagaimana menyusun rencana kerja dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok. Dalam hal ini ada kemampuan membuat usulan kerja. Pengertian pelatihan pun prosesnya tidak seperti yang selama ini, yang diselenggarakan dalam ruangan khusus, tetapi dilakukan dalam berbagai kesempatan untuk berinteraksi secara informal.

Keempat, kelompok yang menyusun rencana kerja implementasi ke dalam kerja sampai panen/menjual hasil. Kelompok sebagai wadah organisasi mengaktualisasikan dari sesuai dengan tugas-tugasnya.

Kelima, evaluasi yang terdiri evaluasi antara dan evaluasi terakhir. Setiap anggota kelompok mempunyai peranan evaluatif terhadap kegiatan kelompok. Evaluasi ini dituangkan dalam laporan, yang mengandung berbagai temuan dan saran. Saran-saran sebagai umpan balik, dapat mengoreksi kesalahan masa lalu.

Dalam masa itu banyak diskusi-diskusi yang perlu diselenggarakan, sehingga cepat diketahui masalah-masalah yang dihadapi yang harus segera ditanggulangi. Lazimnya, secara teratur ada pertemuan mingguan atau bulanan. Diskusi-diskusi ini berlangsung dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama. Ada kelompok ternak kambing, kelompok tambak ikan, kelompok pangan, kelompok pengrajin sapu, kelompok tukang kayu dan lain sebagainya.

Kelompok ini merupakan organisasi untuk mobilisasi. Organisasi ini penting untuk berperan antara lain dalam hal:

- (1). Wadah untuk latihan berbagi dan melimpahkan tugas
- (2). Wadah partisipasi kelompok;
- (3). Memperoleh *synergistic effect*;
- (4). Mempercepat mendapatkan informasi;
- (5). Menghimpun kekuatan yang beragam, baik dalam pengalaman maupun pengetahuan;
- (6). Menghimpun dana internal dan eksternal;
- (7). Tempat untuk berlatih dalam bersaing, tetapi bersanding.

Pengaturan waktu hendaklah hati-hati, oleh karena anggota kelompok sangat terkait dengan kegiatan mencari nafkah yang berbeda dengan usaha pilihan kelompok. Tidak pula dapat dihindarkan pertemuan-pertemuan kadang-kadang mempunyai insentif, baik secara sosial maupun ekonomi, misalnya arisan, jimpitan, baca Yasin/pengajian, atau menikmati ceramah agama melalui kaset dan sebagainya.

Dalam pertemuan-pertemuan terjadi interaksi. Pada kesempatan itu pula secara tidak disadari proses *building each together* atau pun *sharpening each other* seperti yang telah berhasil dilakukan di Afrika Selatan. Malahan kegiatan transformasi informasi dan pengetahuan dapat juga dilaksanakan melalui acara-acara sosial lainnya.

Antar kelompok juga ada interaksi, dan diupayakan ada unsur-unsur persaingan sehat dengan motto: Bersaing dan bersanding. Dalam persaingan ini juga disediakan hadiah khusus bagi yang terbaik proses dan kinerjanya. Hadiah-hadiah itu usahakan relevan dengan usahanya, misalnya hadiah pupuk, bibit-ikan dan tanaman, pemberantas hama dan sebagainya. Dalam hal inilah aspek keterpaduan itu dapat diaktualkan. Antar pembina pada wilayah tertentu diupayakan ada pertemuan dan kunjungan antar desa oleh kelompok sebagai upaya studi banding, untuk membuka wawasan kelompok dan anggotanya. Kelompok-ke-

lompok ini akan dapat menjadi embrio secara spontan dan bertahap membentuk organisasi untuk kepentingan bersama, seperti membeli pupuk, menjual hasil, pinjam meminjam dan sebagainya. Ini pulalah bibit koperasi yang diidamkan oleh Bung Hatta. Bukan koperasi yang *jatuh bebas*, sehingga koperasi itu kurang berakar pada kemauan dan kepentingan anggota.

Jika proses ini dapat berjalan, maka jika kelompok ini dilepas, mereka telah mampu jalan sendiri dan menggulirkan, tidak saja dana tetapi juga ilmunya. Namun demikian masih sering terjadi adalah masalah-masalah yang kurang menjadi perhatian masyarakat untuk memberantasnya, seperti pencurian, air bah, dan konflik-konflik sosial dalam desa. Hal ini dari awal perlu identifikasi lebih dalam. Aspek-aspek keamanan tidak bisa ditanggulangi hanya oleh satu-dua desa, karena mencakup kawasan yang luas.

Namun demikian, apa yang disampaikan masih sepotong kegiatan dalam proses industri primer, padahal untuk nilai tambah yang lebih tinggi dan permintaan pasar yang elastik ditemukan pada industri sekunder, yakni industri pengolahan. Kalau demikian, tugas belum selesai. Tugas seperti kembali ke arah awal. Dunia baru akan ditemukan kelompok. Untuk menjadi kapten *dalam dunia industri*, kelompok harus menambah ilmu lagi, sedangkan bentuk pancingnya berubah.

Hasil-hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah, cepat rusak, nilai tambahnya rendah, pasar cepat jenuh, oleh karena itu proses pengolahan dan pemasaran diberikan dalam pelatihan dan penyuluhan, walaupun dalam skala yang kecil. Ubi dan pisang harus diolah menjadi kripik, cabe diproses dalam bentuk botolan, kopi digiling sehingga dalam bentuk bubuk, ikan dari kolam diawetkan, duren yang berlimpah pada musimnya diolah menjadi lempok dan

sebagainya.

Dalam hal ini kesinambungan bahan baku telah dijamin, sehingga hasil-hasil tidak hanya secara musiman, tetapi dapat diperoleh sepanjang tahun. Di samping itu ada penjamin dana, angkutan, membeli alat-alat produksi, pengawetan dan lain-lain. Ini membutuhkan teknologi dan organisasi yang makin besar dalam dunia agrobisnis.

Sumberdaya manusia telah tumbuh dan berkembang kualitasnya dari bawah, yang terus menerus dikembangkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan perkembangan. Kelompok-kelompok ini akan menjadi sumber, baik dalam permodalan maupun dalam ketrampilan. Inilah arti sederhana dari kata penguliran. Baik modal hibah, nilai tambah yang dapat diciptakan maupun ketrampilan pengelolaan dapat digulirkan ke dalam kelompok maupun ke luar kelompok.

Ukuran tadi dengan asumsi sarana produksi dan prasarana yang diperlukan telah tersedia, jika tidak ada prosesnya lebih panjang lagi. Oleh karena itu di sinilah peranan pemerintah terutama membantu prasarana, seperti irigasi rakyat, di pasar ada pupuk obat hama, alat-alat pertanian dan sebagainya yang dapat dibeli petani/ disubsidi.

Prosesnya demikian juga jika yang dibina adalah pengrajin atau pedagang kecil dan kegiatan jasa lainnya. Justru proses yang demikian selama ini yang menjadi kelemahan, sehingga pola Bapak-Anak angkat banyak yang gagal, kemudian belakangan ini diubah lagi, karena pola tadi mencerminkan perilaku paternalistik plus eksploitatif, sehingga menjadi mitra-usaha. Pola terakhir ini untuk menjamin adanya sikap "equality" antara pemilik dana/ pembina dengan yang dibina. Kegiatan usaha dapat juga dalam bentuk komplemen dengan usaha pembina atau juga produk-produk yang bisa digunakan dalam

proses produk pada usaha besar atau memang bebas sama sekali dan pemilik dana menyewa pembina yang profesional.

Jadi, jelas bahwa proses itu tidak cukup hanya dengan memberikan pancing dan umpan, tetapi juga perlu diperhatikan ikan dan ilmu, sehingga dapat diamalkan. Sekali lagi paradigma pepatah: "Jangan berikan ikan, tetapi berikan pancing", agaknya tidak mungkin untuk masyarakat yang masih tertinggal. Saya khawatir, tidak hanya umpan, pancing pun ditelan.

Daftar Pustaka

- Coomb, Philip H dan Mazoor Ahmed, 1974, *Attacking Rural Poverty*, John Hopkins University Press: Baltimore.
- Fernandes, Walter dan Rajesh Tandon, 1993, *Riset Partisipatoris, Riset Pembebasan*, Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.
- Hasibuan, Nurimansyah, 1995, *Metode Alternatif Pengentasan Pendudukan Miskin*, Universitas Sriwijaya; Palembang.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi, 1987, *Dilema Ekonomi Desa*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Kasryno, Faisal, (Ed), 1984, *Prospek Pembangunan ekonomi Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor: Jakarta.
- Lindblad, J. Thomas, (Ed), 1993, *New Challenges In The Modern Economic History of Indonesia*, Programme of Indonesia Studies: Leiden.
- Marjanto, Danusaputro, et al, 1991, *Monetisasi Pedesaan*, Lembaga Pengembangan perbankan Indonesia: Jakarta.
- Mubyarto, 1996, *Ekonomi Rakyat dan program IDT*, Bappenas/Aditya Media: Yogyakarta.
- Rahman, Khan, Azizur dan Rehman Sobhan, (Ed), 1990, *Trade, Planning*

- and Rural Development, Macmillan Press: London.
- Wharton, Clifton R., 1965, *Subsistence Agriculture and Economic Development*, ALDINE Publishing company: Chicago.
- Refield, Robert, 1985, *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, Rajawali: Jakarta.
- Scott, James C., 1981, *Ekonomi Petani*, LP3ES: Jakarta.
- Wolf, Eric R., 1966, *Petani: Suatu tinjauan Antropologis*, Rajawali: Jakarta.
- Zachrias, Danny, Soedjatmoko, et. al, 1984, *Metodologi Penelitian Pedesaan*: Rajawali: Jakarta.

